

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis akan menggunakan teori budaya politik sebagai teori utama dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini fokus kepada perubahan budaya politik generasi Z pasca terjadinya aksi digital gerakan reformasi dikorupsi pada September 2019-

2.1.1 Gerakan Sosial Digital

Macionis menjelaskan, gerakan sosial (*social movement*) merupakan tipe paling penting dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial lebih sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif (*collective action*) daripada sebagai bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*). Stolley, tarrow dan Macionis berpendapat bahwa gerakan sosial (*social movement*) berbeda dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) (Macionis,1999: 607).

Menurut Stolley dengan mengutip pendapat Tarrow, menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya pencapaian tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang status *quo*, wewenang dan budaya yang sudah mapan. Orang-orang yang melakukan suatu gerakan membangun perasaan identitas kolektif, yakni membagi perasaan bersama tentang penyebab dan membantu usaha-usaha mereka dengan mempertahankan suatu gerakan. Beberapa gerakan berjalan dengan singkat dan kemudian berhenti, bisa gagal atau berhasil mencapai tujuannya. Beberapa gerakan yang lainnya, berjalan melalui waktu yang lama dan memiliki pendukung yang memberikan dukungan sepanjang kehidupannya (Stolley, 2005: 188).

Gerakan Sosial, yakni perspektif gerakan sosial baru muncul sekitar era tahun 1960-an dan 1970-an terutama di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika. Masyarakat Eropa dan Amerika saat itu menyaksikan munculnya gerakan skala besar sekitar isu-isu yang mendasarkan ada aspek humanis (*humanist*), kultural (*cultural*), dan nonmaterialistik (*non-materialistic*). Tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari gerakan

ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan model gerakan sosial lama (Klasik dan Neo-Klasik), maka model gerakan sosial baru (*New Social Movements*) tidak terjebak ke dalam diskursus ideologi yang mempertanyakan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Dengan demikian, gerakan sosial baru tidak tertarik dengan ide revolusi, termasuk melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan. Namun demikian, strategi dan tujuan dari gerakan sosial baru memiliki sedikit kesamaan dengan model gerakan sosial lama, yaitu dalam memperjuangkan isu-isu seperti peningkatan buruh industri, menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas (Singh, 2010:121- 122).

Gerakan sosial baru menampilkan gerakan plural. Ekspresi dari bentuk ini (*polymorphous*) adalah dengan memulai anti rasisme, anti nuklir, perluncutan senjata, *feminism*, *environmentalism*, *regionalism* dan etnisitas, kebebasan sipil, dst, sampai isu-isu kebebasan personal dan perdamaian. Pergeseran dari masyarakat modernism ke *post-modernist-post-society*, dicerminkan oleh pergeseran serupa dalam bentuk gerakan-gerakan sosial yang berubah dari bentuk “lama” gerakan klasik dan neo-klasik ke gerakan sosial “baru”. Perubahan bentuk-bentuk masyarakat kami ajukan sebagai cerminan atas perubahan dalam bentuk gerakan sosial.

New social movement yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an ketika pasca terjadinya ekonomi industri. Terdapat dua klaim utama dalam teori ini yaitu pertama, tumbuhnya ekonomi industri menyebabkan munculnya gelombang baru dalam gerakan sosial dan kedua, pergerakan baru tersebut berbeda dari pergerakan sosial industri ekonomi sebelumnya. Perbedaan utama dari pergerakan ini dapat dilihat dari tujuannya. Pergerakan sosial yang baru tidak berfokus pada isu-isu materialistik seperti ekonomi, namun lebih berfokus pada isu-isu sosial maupun HAM, misalnya hak gay. *New social movement* tidak mendorong pada perubahan kebijakan publik melainkan menekankan pada perubahan sosial identitas, gaya hidup, dan budaya. Aktor utama dalam gerakan ini juga tidak hanya berasal dari individu kelas bawah, namun juga dari kelas menengah. Jika *old social movement* berargumen

bahwa gerakan kolektif dari pekerja dilakukan berdasarkan kelas dan ideologi, *new social movement* mengasumsikan bahwa gerakan sosial berasal dari kelas baru yang berada diluar *labor market*. Contoh dari *new social movement* antara lain, pergerakan anti nuklir, *free software movement*, *landless people movement* di Afrika Selatan, *Zapatista Army* di Meksiko, gaya nusantara, dan sebagainya. Pergerakan sosial baru ini juga menarik partisipan internasional dan cukup bergantung pada jaringan transnasional untuk mencapai tujuannya (Muzaqqi, 2017).

Tabel 2. Perbedaan Gerakan Sosial

	Amerika Serikat	Eropa
Sebelum Era 1970	Perilaku kolektif (<i>Collective Behaviour</i>)	Marxisme (<i>Marxism</i>)
Setelah Era 1970	Mobilisasi Sumberdaya/ Proses Politik (<i>Resource Mobilization/Political Process</i>)	Gerakan Sosial Baru (<i>New Social Movements</i>)

Sumber: Crossley, 2002

Gerakan sosial tidak selalu soal kekerasan fisik, turun ke jalan, protes langsung ke depan instansi, akan tetapi banyak sudah gerakan sosial baru yang memanfaatkan beberapa media di internet. Perihal gerakan sosial sendiri dalam perkembangannya dengan arus globalisasi dan modernisasi yang pesat gerakan sosial mulai memasuki ruang digital. Gerakan sosial dalam ruang digital ini dapat membangun opini publik akibat adanya transformasi gerakan sosial pada media digital tersebut.

Dalam perkembangannya gerakan sosial seringkali mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, bahkan dalam sepuluh tahun terakhir gerakan sosial mulai mengikuti arus modernisasi dan globalisasi dengan melibatkan gerakan sosial kepada ruang digital. Dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya pemanfaat teknologi dan

media dilakukan untuk dapat menghimpun gerakan sosial. Upaya keinginan melakukan gerakan sosial diawali karena adanya kesamaan tujuan, dan keinginan. Hal tersebut—pada akhirnya menjadikan sebuah ketertarikan membangun opini publik dan melakuakn gerakan sosial dengan keterlibatan ruang digital (Afifah Zulfika, 2021: 209). Gerakan sosial digital lahir karena adanya suatu perkembangan teknologi yang salah satunya adalah media sosial. *Digital movement* gerakan sosial digital ini dapat dikatakan sebagai mobilisasi online massa dalam memberikan suatu reaksi terhadap suatu isu permasalahan tertentu yang memberikan keresahan bagi masyarakat Airoidi dalam (Prihantoro et al., 2021: 80).

Gerakan sosial digital ini dinilai sebagai gerakan sosial yang spontan dan dinilai sebagai kombinasi dari konsep antara sosial dan opini publik. Penggunaan media digital dalam gerakan sosial sendiri menurut Nugroho dalam dinilai lebih efektif karena dapat dilakukan dengan kurun waktu yang relatif singkat dalam memperoleh banyak dukungan dari pada pengguna media digital khususnya pengguna media sosial dalam melakukan suatu gerakan sosial digital. Penilaian penggunaan media sosial sebagai alat gerakan sosial yang efektif dapat dibuktikan dengan adanya perilaku masa yang berpartisipasi dengan dilatar belakangi atas gerakan sosial tersebut secara online (Prihantoro et al., 2021: 81).

Gerakan yang dilakukan secara online tersebut dilakukan hingga membentuk kebiasaan dan kebutuhan menjadi warga digital atau yang biasa disebut dengan digital citizen atau warga digital. Warga digital adalah salah satu aspek dari evolusi kontemporer yang lebih besar dari sosok warga negara, evolusi yang bergerak menjauh dari warga negara yang sudah memiliki hak menuju warga negara sebagaimana dibentuk melalui tindakan (Evelyn Ruppert & Engin Isin, 2020). Manusia membentuk dunia maya itu sendiri, serta diri mereka sendiri sebagai warga digital, dengan mengatakan dan melakukan sesuatu. Suatu tindakan, khususnya tuntutan hak, berdampak melalui kekuatan konstitutif kekuatan performatif, hukum, dan imajiner. Tak hanya itu, menjadi warga digital memberikan kontribusi kerangka kerja konseptual yang bernuansa, fleksibel, seputar aktivitas politik kontemporer, terutama yang berlangsung melalui internet.

Gerakan sosial digital dijadikan sebagai ruang publik untuk dapat bergerak dengan waktu yang singkat pada dunia modern ini. Hal ini pada akhirnya dijadikan strategi gerakan bagi masyarakat modern maupun mahasiswa melalui media sosialnya untuk terlibat dalam suatu gerakan sosial. Menurut Benford dan Show, terdapat tiga hal yang menjadi suatu unsur pokok dalam gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial dilakukan atas dasar tujuan yang sama. Kedua, gerakan sosial dilakukan secara kolektif dengan tujuan dan kepentingan kolektif juga. Ketiga gerakan sosial memiliki keinginan atas sebuah perubahan (Afifah Zulfika, 2021: 209).

Media digital salah satunya adalah media sosial twitter dijadikan sebagai alat gerakan sosial dalam menyalurkan opini para pengguna media sosial melalui digital. Media sosial twitter juga menjadi suatu sarana yang dinilai lebih efisien dan tepat karena dapat menyampaikannya secara langsung kepada pihak yang ingin ditujukan dalam melakukan gerakan sosial pada media sosial twitter para pengguna yang terlibat menggunakan hastag dalam gerakannya untuk membentuk suatu opini dalam satu kelompok. Hastag merupakan salah satu media yang digunakan dalam aktivitas digital yang memberikan saran dan tagar/*hastag* untuk dapat melihat emosional dan imajinasi naratif dalam ranah digital. Para pengguna dapat menunjukkan sikap setuju atau tidaknya terhadap suatu isu permasalahan yang sedang diangkat serta dapat mengupload komentarnya disertai dengan tagar tertentu (Prihantoro et al., 2021: 82).

Demikian pula fasilitas yang ada pada internet memberikan kualitas pada informasi dan berita yang dimuat, seperti fasilitas *hyperlink* yang dapat menghubungkan dari situs ke situs lainnya sebagai referensi terhadap berita yang dimuat selain itu juga untuk memudahkan pengguna (pembaca) dalam mencari atau memperoleh informasi lainnya. Internet muncul sebagai medium massa besar ke delapan dengan banyak isi, terutama melalui *web coding*, yang melebihi media tradisional dalam banyak hal. ~~Sebuah~~ keunggulan dari media online dari media lainnya terletak pada informasinya yang cepat dan memiliki penyajian berita yang mudah dan sederhana, menyajikan informasi dan berita pada saat peristiwa berlangsung yang membuat berita tersebut *realtime*. Selain itu, media online dapat

diakses dimana dan kapan saja sejauh didukung dengan fasilitas teknologi internet (John Vivian, 2015: 262).

Gerakan ini berawal dari media sosial dengan tagar #ReformasiDikorupsi yang kemudian ramai dan menjadi aksi demonstrasi dengan skala nasional, gerakan reformasi dikorupsi tersebut merupakan gerakan terbesar kedua setelah gerakan reformasi pada tahun 1998 lalu. Melewati pertengahan tahun 2019 Revisi UU KPK mulai ramai dan viral karena beredar #SaveKPK di Twitter yang sempat menjadi *trending topic* pertama. Tagar #GejayanMemanggil menjadi awal terbentuknya gerakan mahasiswa pada tanggal 23 September 2019 yang menjadi seruan aksi untuk turun ke jalan dengan beberapa tuntutan termasuk tuntutan terkait revisi UU KPK terbaru yang membuat mahasiswa memiliki beberapa tagar (#) pendukung lainnya seperti #HidupMahasiswa dan #ReformasiDiKorupsi.

Kemunculan tagar #ReformasiDiKorupsi menarik banyak kalangan warga Indonesia untuk berpartisipasi, berkomentar dan mengkritik Rancangan UU KPK tentang dan RKUHP serta mendukung gerakan mahasiswa. Tokoh masyarakat dan tokoh mahasiswa berpartisipasi dalam animasi #ReformasiDiKorupsi mewakili ketidakadilan di negara demokrasi ini. Bahkan tagar #ReformasiDiKorupsi menjadi titik kuat bagi mahasiswa yang turun ke jalan untuk menuntut haknya. Bukan hanya babak pertama, jilid II dan III tetap menggunakan kekuatan tagar #ReformasiDiKorupsi.

Gambar 2.1 Aksi Digital Reformasi Dikorupsi di Twitter



Sumber: Twitter

Pada September 2019 menghadirkan tantangan besar bagi DPR RI dan pemerintahan baru, juga menghadirkan investasi kepercayaan publik ke masa depan. Kondisi ini memaksa pemerintah dan DPR RI untuk menggabungkan program prioritas untuk membuat keputusan penting. Demikian pula dalam kaitannya dengan komunitas, pemerintah harus mengurangi metode pertahanan atau tindakan represif, sedangkan pemerintah harus tetap mendukung metode dialog dengan berbagai pemangku kepentingan demi keseimbangan ruang partisipasi yang luas.

2.1.2 Media Sosial

Selain media massa saat ini Media sosial telah menjadi *trend* dalam komunikasi politik. Media sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*” (Kaplan & Haenlein, 2010). Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instragam, Twitter, Line, Facebook, Youtube, dan lain-lain. Perkembangan dari penggunaan media sosial di Indonesia sangat berkembang pesat. Menurut riset Nielsen menunjukkan tingkat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mencapai 26% orang Indonesia menghabiskan waktu 1,5 jam sehari untuk menggunakan internet. Menurut ICT Watch, saat ini pengguna ponsel di Indonesia mencapai 180 juta orang dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia. Pengguna Instagram di Indonesia mencapai 22 juta pengguna aktif menurut dari siaran pers yang diterima CNN Indonesia (Lesmana, 2012).

Menurut Tomaz Dazelan dan Igor Vobic dalam bukunya yang berjudul *(R)evolutionizing Political Communication through Social Media* mengatakan perluasan media sosial telah berkontribusi pada modernisasi komunikasi politik yang

signifikan sebagai sarana baru untuk memungkinkan komunikasi langsung dengan follower, dan memberikan pengaruh pada komunikasi pesan-pesan politik kepada pemilih. Mcnamara & Kenning menemukan bahwa terlepas dari beberapa pengecualian, politisi menggunakan media sosial sebagai transmisi pesan politik satu arah, daripada keterlibatan warga yang menunjukkan bahwa banyak dari konten media sosial yang terdiri dari slogan pemilihan, menyerang lawan-lawan dan retorika politik yang sebagian besar bersifat dangkal dan pragmatis. Selain itu, pengamatan penting lainnya dari penelitian mereka adalah korelasi antara "*follower*/pengikut" dan "*following*/orang yang mengikuti" sebagai indikator minat timbal balik dan saling mendengarkan pertukaran ide dan gagasan (Mcnamara, dkk, 2011: 45).

Twitter merupakan jenis media sosial *microblogging* yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. Secara historis, kehadiran dan munculnya media sosial twitter yang menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Sama seperti media sosial lainnya, di twitter pengguna bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pendapat/pandangan pengguna lain, sampai membahas isu terhangat (*trending topic*) saat itu juga dan menjadi bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau (*tweet*) menggunakan tagar (*hashtag*) tertentu (Nasrulah, 2015:43).

Gambar 4. Gerakan Digital Reformasi Dikorupsi di Twitter



Sumber: Twitter

Dalam hal ini sebuah hashtag (#) disebut-sebut sebagai alat propaganda modern. Tanda pagar atau tagar atau hashtag atau simbol (#) dipopulerkan oleh twitter mempunyai peran besar dalam meramaikannya percakapan dan menjadi *trending topic* pada media sosial. *Hashtag* digunakan untuk mengindeks kata kunci atau topik di twitter, dan memungkinkan pengguna untuk mengikuti topik yang diminati dengan mudah. Awal kemunculan tagar lebih digunakan untuk menggabungkan suatu topik pembicaraan agar mudah dimonitor oleh pengguna. Untuk membuat tagar yang membuat orang tertarik biasanya adalah kata yang mudah diingat dan hanya bisa satu kata, tidak bisa menggunakan spasi atau tanda baca yang lain. Pada 24 September 2019, mahasiswa seluruh Jakarta dan sekitarnya berkumpul di sekitar kompleks DPR. Mahasiswa menyerukan keluhan atas RUU KPK, disertai dorongan membatalkan beberapa RUU lainnya. Aksi mahasiswa ini juga didukung oleh kelompok sipil seperti Aliansi Masyarakat Anti Penggusuran dan Jaringan Buruh Migran (Kompas, 24/09/2019).

Aksi demonstrasi mahasiswa 24 September 2019 membawa tujuh tuntutan pokok yang telah dipersiapkan untuk diberikan kepada tiga lembaga di Indonesia

terutama untuk DPR RI selaku pembuat regulasi dan sebagai materi dalam aksi tersebut. Tujuh tuntutan itu adalah:

- a. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Pembahasan RKUHP menuai banyak polemik, dalam RKUHP terdapat pasal yang dianggap mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, contoh lain dari pasal kontroversial yang terdapat dalam RKUHP adalah pasal 470 dan pasal 471 tentang perempuan yang melakukan aborsi akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan empat tahun penjara. Contoh lain adalah Pasal 417 tentang setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II (Tempo, 2019).
- b. Revisi UU KPK yang sudah disahkan dan menolak segala bentuk upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat enam poin yang menjadi tuntutan mahasiswa untuk direvisi yaitu, status kedudukan lembaga KPK yang akan berubah menjadi lembaga penegak hukum yang berada di rumpun eksekutif. Kedua, keberadaan Dewan Pengawas KPK yang punya kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang KPK seperti memberi izin/tidak dalam penyadapan, penggeledahan dan lain-lain. Ketiga, pembatasan fungsi penyadapan karena KPK wajib meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas. Keempat, KPK berwenang menerbitkan SP3 untuk perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Kelima, KPK wajib berkoordinasi dengan penegak hukum lain dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Keenam, mekanisme penyitaan dan penggeladahan serta status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (Kompas, 2019).
- c. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, masyarakat menuntut para pelaku pembakaran hutan di Sebagian daerah Sumatera dan Kalimantan diadili dan proses hukum harus dilakukan secara terbuka (Kompas, 2019).

- d. Menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan, terdapat pasal-pasal revisi yang ditolak oleh para asosiasi buruh. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah dihapusnya pasal 81 tentang cuti haid kemudian, Pasal 100 mengenai fasilitas Kesehatan akan dihapuskan dan pasal 151-155 mengenai penetapan PHK (Kompas, 2019).
- e. Menolak pasal-pasal dalam RUU Pertanahan, RUU tersebut tidak ada upaya konkret untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, kemudian ada kecenderungan memberikan banyak kemudahan investasi bagi pemegang hak Guna Umum, Hak Guna Bangunan, dan hak pakai berjangka waktu. Selanjutnya, tidak ada upaya untuk memprioritaskan pemberian hak pakai kepada koperasi buruh tani, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil lainnya. Terhapusnya status tanah hak bekas milik pribadi yang kedepannya akan menjadi tanah negara. Terakhir tidak ada kebijakan untuk memberantas mafia tanag dan mengendalikan nilai tanah (Kompas, 2019).
- f. Mendesak pengesahan RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual, DPR diminta segera memberi kepastian kapan RUU PKS akan disahkan. karena RUU ini sudah dibahas dari tahun 2017. RUU ini dianggap krusial karena berkaitan dengan keamanan perempuan saat berada di ruang publik. Tak hanya mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, RUU PKS juga mengatur pencegahan kekerasan seksual (Kompas, 2019).
- g. Menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor, hal tersebut dilakukan untuk mendorong demokratisasi di Indonesia guna menjalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya.

Di ranah dunia maya, data yang disampaikan *Drone Emprit Academic* menunjukkan bahwa RKUHP menjadi topik yang mencolok di jejaring sosial mikroblog twitter. Sejak tanggal 16 September 2019 terdapat 782 cuitan yang muncul dan sehari kemudian jumlahnya naik mencapai 8.108 twit. Topik ini terus memuncak hingga lebih dari 12 ribu cuitan pada tanggal 21 September 2019 dini hari. Percakapan itu juga disertai dengan tagar #tundaRKUHP, #MahasiswaBergerak, #TolakRUUKUHP, #ruukuhp, dan #ReformasiDikorupsi (Hidayat, 2019: 13).

Aksi di sosial media diikuti dengan serangkaian demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada puncak aksi 24 September 2019, jumlah demonstran yang turun ke jalan mencapai 52.645 orang (Dongoran, 2019). Demonstrasi mahasiswa yang tadinya damai lambat laun berubah menjadi anarkis, hal ini terjadi karena unjuk rasa berlangsung dalam jumlah besar dan menjadi peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba, sehingga protes 24 September 2019 dan protes berikutnya menunjukkan hubungan represif antara aparat dan pengunjuk rasa. Menanggapi protes skala besar ini, pemerintahan demokratis melakukan beberapa tindakan. Beberapa dari mereka mengabaikannya dengan strategi penahanan secara represif dan strategi kerjasama.

Gerakan Reformasi dikorupsi menjadi aksi yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti di tahun 2019 saja, aksi lanjutan ini masih berlanjut yang dibuat oleh para elemen masyarakat tersebut terutama mahasiswa. Gerakan ini seolah menimbulkan luka baru terhadap pemuda pemudi Indonesia generasi z yang dimana aksi tersebut tetap diindah kan setiap tahunnya. Pasca terjadinya gerakan reformasi dikorupsi aksi lanjutan setiap tahunnya tetap dilaksanakan. Semenjak adanya gerakan tersebut seolah menimbulkan harapan bagi para kaum-kaum tertindas, bahkan tidak berhenti sampai diaksi lapangan saja, gerakan reformasi dikorupsi saat ini diabadikan melalui *platform* twitter. Penggerak reformasi dikorupsi pun membuat akun di media sosial twitter dengan nama @ReformasiDikorupsi, akun-akun tersebut sampai saat ini masih aktif mensuarakan ketidaksesuaian yang terjadi di pemerintahan dan memberikan informasi terkait mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan aksi, akun ini pun masih menggunakan tulisan #MosiTidakPercaya yang sempat menjadi *icon* dari gerakan tersebut. Ungkapan mosi tidak percaya dilontarkan oleh saudara Manik Marganamahendra selaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia periode 2019 bersama aliansi dari BEM yang berasal dari universitas lainnya, seperti Universitas Gajah Mada dan lain-lain.

Gambar 5. Aksi Digital Reformasi Dikorupsi di Twitter



Sumber: Twitter

2.1.3 Generasi Zelenial (Generasi Z) Sebagai Generasi Digital di Era Pemerintahan Digital

Disebut juga iGeneration, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, berikut ini karakteristik Generasi Z: 1. Fasih Teknologi, tech-savvy, web-savvy, appfriendly generation, mereka adalah “generasi digital” yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya. 2. Media sosial, mereka sangat sering berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan. Mereka sangat sering berkomunikasi dan berinteraksi melalui berbagai situs jejaring sosial media, Melalui media sosial mereka bisa

mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya secara spontan; 3. Ekspresif, generasi Z cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan; 4. *Multitasking*, mereka terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Generasi z bisa membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Generasi Z dianggap menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan dan berjalan serba cepat. Mereka tidak menginginkan hal-hal yang lambat dan sulit; 5. Cepat berpindah dari satu pemikiran/pekerjaan ke pemikiran/pekerjaan lain (*fast switcher*); 6. Senang berbagi, generasi Z dianggap lebih senang berbagi (Hadian Wijoyo, 2020: 1).

Kemajuan jaman juga menyebabkan komposisi penduduk tiap generasi akan berubah, komposisi kelompok *baby boomers* mulai menurun, jika terkait dengan usia produktif dan komposisi angkatan kerja maka jumlah kelompok generasi X dan Y yang terbanyak. Selain itu, mulai bangkit generasi yang mulai memasuki angkatan kerja yang disebut dengan generasi Z. Penelitian Bencsik, Csikos, dan Juhez (2016) menunjukkan masuknya Generasi Z didalam kelompok generasi, yang dapat dilihat dalam tabel berikut: Enam kelompok generasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Generasi paling muda yang baru memasuki angkatan kerja adalah generasi Z, disebut juga iGeneration atau generasi internet. Generasi Z memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (*multi tasking*) seperti: menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil 3 generasi ini sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian (Hadian Wijoyo, 2020: 2).

Max Mihelich menggambarkan bahwa generasi Z sangat peduli dengan masalah lingkungan, sangat sadar akan kelangkaan dan kekurangan air yang membayangi yang menandakan bahwa mereka memiliki rasa yang tinggi tanggung jawab terhadap sumber daya alam. Teknologi adalah bagian dari identitas mereka dan mereka paham teknologi tetapi tidak memiliki keterampilan memecahkan masalah

dan belum menunjukkan kemampuan untuk melihat situasi, menempatkan dalam konteks, menganalisis dan membuat keputusan (Joseph Coombs, 2013: 45).

Sadar atau tidak sadar, perkembangan teknologi digital khususnya media baru dan media sosial mempengaruhi partisipasi politik masyarakat (Akmal & Salman, 2015: 88). Jika dulu partisipasi politik dilakukan secara tradisional (tanpa penggunaan media baru), namun sekarang partisipasi politik juga dapat dilakukan di media baru bahkan media sosial. Generasi Z yang sudah mengenal kecanggihan internet sejak kecil akan lebih mudah untuk berpartisipasi politik. Salah satu tempat dengan jumlah generasi Z cukup banyak serta memiliki beragam jenis orang dan latar belakangnya adalah lingkungan kampus, karena di lingkungan kampus berbagai macam latar belakang demografis seseorang berkumpul untuk belajar bagi para mahasiswa (Halim, 2020: 31). Aktivitas partisipasi politik tersebut dapat diwadahi oleh internet secara online seperti mendapatkan informasi dari konten yang diunggah orang lain, dapat bebas berekspresi menyatakan pendapat di akun media sosialnya atau dikolom komentar posting-an orang lain terkait pemerintahan saat ini, media interaktif untuk melihat aktivitas kandidat politik dalam melayani rakyat (Salman, Salleh, Yusoff, & Abdullah, 2018).

Gambar 6. Spesifikasi Generasi

Tahun Kelahiran	Nama Generasi
1925 – 1946	<i>Veteran generation</i>
1946 – 1960	<i>Baby boom generation</i>
1960 – 1980	<i>X generation</i>
1980 – 1995	<i>Y generation</i>
1995 – 2010	<i>Z generation</i>
2010 +	<i>Alfa generation</i>

Sumber : Hadian Wijoyo, 2020: 1

Forbes Magazine membuat survei tentang generasi Z di Amerika Utara dan Selatan, di Afrika, di Eropa, di Asia dan di Timur Tengah dengan 49 ribu anak-anak ditanya. Atas dasar hasil itu dapat dikatakan bahwa generasi Z adalah mereka telah tumbuh di lingkungan yang tidak pasti dan kompleks yang menentukan pandangan

mereka tentang pekerjaan, belajar dan dunia. Mereka memiliki harapan yang berbeda di tempat kerja mereka, berorientasi karir, generasi profesional yang ambisius, memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan bahasa pada tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka tenaga kerja yang sangat baik (Hadian Wijoyo, 2020: 4).

2.1.3 Teori Budaya Politik

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai: “Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut” (Almond dan Verba, 1984: 14). Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen yaitu:

- a. Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang santri terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negaa, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.
- b. Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
- c. Komponen Evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan (Powell, 1966)

Miriam Budiardjo menjelaskan salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (*political culture*) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya

politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik (Miriam Budiardjo, 2008: 58-59). Budaya Politik merupakan satu sisi penampilan dari kebudayaan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, orang akan sia-sia membayangkan sebuah tatanan dan perilaku politik (Rusadi Kantaprawira, 1995: 26).

Budaya politik sendiri juga tidak akan memadai mengukur derajat demokrasi atau konstitusionalnya konduk kenegaraan semata-mata dari hadirnya kelembagaan politik yang ada. Budaya Politik merupakan rangkuman dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut. Di samping hadir dan berfungsinya kelembagaan politik yang ada tidak pula kalah penting suatu peluang dan kendala pemanfaatan (*Exercise*) wahana kedaulatan rakyat itu. Budaya politik hakikatnya juga mengandung dimensi pendidikan politik dan hasil guna serta daya guna berfungsinya lembaga dan wahana itu dalam kondisi nyata kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan (Rusadi Kantaprawira, 1995: 107).

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elite Indonesia, menurut Benedict Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Kajian tentang budaya politik selalu menarik. Selain berkaitan dengan perkembangan politik di suatu negara, budaya politik juga berhubungan dengan dinamika partisipasi politik masyarakat. Artinya,

perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang ada dalam masyarakat negara tersebut (Sumartono, 2018: 20).

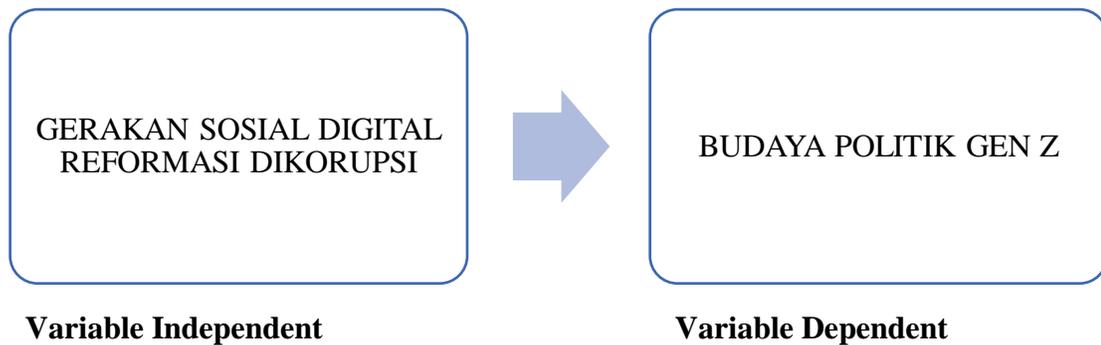
2.1.4.1 Tipe-Tipe Budaya Politik

Berkaitan dengan tipe-tipe budaya politik, Gabriel A Almond Membagi budaya politik menjadi budaya politik parokial, budaya politik kaula (subjek), dan budaya politik partisipan (Effendi, 1991 : 27).

1. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
2. Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik masyarakat yang sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
3. Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif

dalam kegiatan politik. Budaya politik juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

2.2 Kerangka Pemikiran



Tabel 3. Variabel Penelitian

Variable dan Konsep	Dimensi		Indikator	Item Pernyataan
Variabel X (Gerakan Sosial Digital) Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2012) ditemukan bahwa gerakan sosial yang dihasilkan di internet tidak hanya sebatas pada <i>click activism</i> maupun <i>share information</i> , tetapi	1	Tuntutan	Di dalam Gerakan sosial digital berawal dari adanya tuntutan yang membentuk suatu gerakan sosial.	1,2
	2	Sosial Media	Media sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi	3,4

kolaborasi dan kombinasi ruang “real” dan “virtual” telah memberikan konteks dan validasi dalam melakukan gerakan sosial.			meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.	
Selain itu gerakan sosial yang termediasi oleh internet telah memberikan sebuah konsep baru yaitu <i>online social movement</i> . Gerakan sosial yang berlangsung secara digital, atau termediasi oleh internet dianggap sebagai pilihan masyarakat kontemporer saat ini dalam melakukan aktivisme. Dengan meningkatnya penetrasi penggunaan media sosial, memberikan dampak signifikan dan menjadi manifestasi bangkitnya masyarakat sipil dalam melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi Indonesia.	3	Partisipasi dalam gerakan sosial digital	Keikutsertaan dalam gerakan sosial digital reformasi dikorupsi.	5,6
Variable dan Konsep	Dimensi		Indikator	Item Pernyataan
Variabel Y (Budaya Politik) Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam	1	Kognitif	Kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seseorang terhadap jalannya sistem politik dan	7,8

bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik (Alfian dan Sjamsuddin, 1991 : 21).			atributnya.	
	2	Afektif	Menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik tersebut.	9,10
	3	Evaluatif	Menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.	11,12

Sumber: Data diolah, 2023

Gerakan sosial merupakan suatu alat untuk tercapainya sistem demokrasi yang baik, dalam sistem demokrasi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, sehingga ada pepatah yang mencetuskan Vox Populi Vox Dei yang artinya suara rakyat suara Tuhan. Namun dalam kenyataanya rakyat kerap kali ditindas oleh kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh para penguasa-penguasa negara.

Gerakan Reformasi dikorupsi yang merupakan gerakan mahasiswa yang kembali mengguncang tanah air setelah aksi reformasi pada tahun 1998, merupakan gerbang atas kepedulian kembali Gen Z pada dinamika politik negara Indonesia.

Gerakan Reformasi dikorupsi juga sebagai awal mulanya aksi media terjadi secara massif. Gerakan tersebut pun pertama kali tersebar melalui cuitan Gen Z di twitter.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan mengenai gerakan sosial digital reformasi dikorupsi di twitter yang merupakan gerakan termassif setelah gerakan reformasi dikorupsi pada 1998 lalu membuat peneliti memiliki hiotesis mengenai dampak dari gerakan sosial digital tersebut terhadap budaya politik gen z, Gerakan tersebut menjadi pintu utama dari gerakan sosial yang dilakukan secara digital. Pasca terjadinya gerakan sosial Reformasi Dikorupsi membuat generasi Z yang sudah akrab dengan teknologi lebih melihat dunia poli penulis memiliki dua hipotesis yaitu:

H0 = Gerakan Sosial Digital Reformasi Dikorupsi tidak memberikan pengaruh dalam budaya politik Gen Z di Jakarta Timur.

H1 = Gerakan Sosial Digital Reformasi Dikorupsi memberikan pengaruh dalam budaya politik Gen Z di Jakarta Timur.